

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN HARMONI SOSIAL DI ERA MODERNISASI

Aawali Salsabilah

Institut Teknologi Telkom Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: aawalisalsabilah@gmail.com

Siti Maizul Habibah

Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: sitihabibah@unesa.ac.id

Abstrak

Setiap individu maupun kelompok di negara Indonesia ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami konteks keberagaman yang ada. Perbedaan cara pandang ini dapat menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan suatu permasalahan bahkan juga terjadi perpecahan. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan harmoni sosial di era modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat terutama di era modernisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif terhadap kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dengan kelima silanya dari sila pertama hingga sila kelima berperan sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa di Indonesia terdapat banyak keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Di era modernisasi sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat atas perbedaan yang ada, menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati antar sesama tanpa membedakan kasta, tanpa adanya kesenjangan sosial dan bersikap adil kepada seluruh masyarakat yang dapat mewujudkan harmoni sosial di era modernisasi.

Kata Kunci: Aktualisasi, Pancasila, Sosial

Pendahuluan

Berdasarkan letak geografis negara Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia serta Indonesia juga terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu Indonesia berada tepat di garis ekuator atau sering disebut dengan garis khatulistiwa. Hal ini yang menjadi faktor utama Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Jumlah penduduk di Indonesia sangat banyak dan beragam, mulai dari Sabang, Sumatera Utara hingga Merauke, Papua. Di era modernisasi ini Indonesia terus berkembang dari segi budaya. Semakin banyak keberagaman yang ada di Indonesia mulai dari segi bahasa, budaya, maupun gaya hidup masyarakat yang mulai beranjak hidup hedonisme. Hedonisme merupakan pandangan atau filsafat hidup yang menekankan pencarian kebahagiaan dan kesenangan sebagai tujuan utama dalam hidup. Para pendukung hedonisme yang disebut sebagai "hedonist" percaya bahwa tujuan utama dari tindakan dan keputusan mereka untuk menghindari penderitaan dan mencapai kebahagiaan. Selain itu hedonisme dapat menimbulkan banyak masalah etis, seperti konflik antara mengejar kesenangan pribadi dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan, serta kemungkinan penyalahgunaan kebebasan pribadi untuk mencapai kepuasan pribadi (Ismail, n.d.). Dengan gaya hidup yang hedonisme mulai banyak budaya asli Indonesia yang mulai luntur. Dari sisi keberagaman dalam kehidupan bersosial istilah status sosial menengah ke atas dan status sosial menengah ke bawah masih menjadi penyebab masalah pemicu munculnya disharmoni sosial (Suwartiningsih et al., 2018).

Keberagaman yang ada di Indonesia di kehidupan masyarakat ada istilah mayoritas dan minoritas masih menjadi masalah kesenjangan sosial di kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kelompok mayoritas dengan penduduk yang menganut agama Islam sedangkan

kelompok minoritas dengan penduduk yang menganut agama selain Islam. Dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia maka dirumuskanlah suatu aturan atau sumber dari segala hukum yang disebut Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun keharmonisan sosial di kehidupan bermasyarakat. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang masih belum tercapai. Keragaman bangsa Indonesia adalah sumbu yang bisa menjadi penerang bagi harmoni sosial dan juga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan kebanggaan yang sama dalam mempertahankan keutuhan negara Indonesia secara tegas Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur dalam bingkai keadilan sosial (Masyhuri, 2019).

Adanya perbedaan status sosial menengah ke atas dan status sosial menengah ke bawah dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Perbedaan ini juga bisa disebut dengan perbedaan kasta. Status sosial menengah ke atas tergolong masyarakat yang ekonomi menengah ke atas, sedangkan untuk status sosial menengah ke bawah berada pada kasta ekonomi menengah ke bawah. Perbedaan kasta ini bukan menjadi alasan untuk melakukan ketidakadilan yang berpotensi terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan permasalahan global yang melanda berbagai negara terutama pada negara yang masih berkembang. Bahkan permasalahan ini telah menjadi pembahasan utama untuk menetapkan kebijakan perekonomian di berbagai negara sejak dahulu kala (Islahiha et al., n.d.). Kesenjangan sosial menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), sumber daya, dan keterbatasan peluang untuk masyarakat mendapat kesejahteraan sosial. Salah satunya kesenjangan sosial ekonomi masih ada di Indonesia yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi sehingga ada pihak merasa diuntungkan ada pula pihak merasa dirugikan (Della et al., 2022). Sehingga masyarakat Indonesia harus bisa memahami lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan menekankan prinsip keadilan dalam menyejahterakan masyarakat seperti memberi bantuan Pendidikan, bantuan bahan pangan untuk masyarakat menengah ke bawah dengan tujuan meratakan status ekonomi seluruh warga negara. Dengan ini, solusi yang dapat diberikan untuk masalah yang memicu adanya kesenjangan sosial di Indonesia bisa berkurang karena ekonomi di Indonesia sudah mulai membaik dengan adanya bantuan dari pemerintah.

Metode

Metode ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam kehidupan nyata. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena atau peristiwa dalam konteks alamiahnya. Metode ini lebih fokus pada penjelasan mendalam dan pemahaman secara menyeluruh tentang karakteristik suatu objek atau kejadian, tanpa melakukan pengukuran kuantitatif atau statistik.

Hasil dan Pembahasan

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dapat Membantu Mengatasi Masalah Kesenjangan Sosial di Indonesia

Di era modernisasi ini masyarakat Indonesia masih kurang memahami tentang nilai-nilai Pancasila. Sebab antar warga negara Indonesia ini memiliki cara berpikir dan memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai arti dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga masalah seperti kesenjangan sosial kerap terjadi di negara Indonesia. Hal ini yang menyebabkan terjadinya disharmoni sosial yang berakibat adanya perpecahan. Di era modernisasi ini banyak terjadi penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan terjadinya kesenjangan sosial. Sehingga masyarakat harus memahami bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk pedoman hidup di negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi dasar ideologi negara Indonesia yang memiliki lima sila atau lima asas yang berpedoman moral, sosial, dan politik bagi masyarakat Indonesia serta mewujudkan

harmoni sosial di era modernisasi ini dengan cara aktualisasi nilai-nilai Pancasila (Hidayat & Arifin, 2019). Adapun aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar ideologi negara juga dapat mengatasi masalah kesenjangan sosial di Indonesia sebagai berikut:

1. Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dapat diartikan bahwa hanya ada satu Tuhan yang diyakini. Masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk memilih dan memeluk agama yang diyakini dengan agama yang sesuai di Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama pada Pancasila dilambangkan dengan gambar bintang emas yang bermakna cahaya seperti Tuhan yang selalu menjadi cahaya kerohanian bagi setiap umat manusia. Di Indonesia terdapat enam agama yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Budha, agama Katholik, dan agama Konghucu. Sehingga dengan adanya enam agama di Indonesia masyarakat memiliki hak kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini. Namun, masih ada penyimpangan yang terjadi di kehidupan masyarakat, seperti masih banyak masyarakat yang melanggar aturan di agama menurut keyakinannya seperti mengabaikan kewajiban ibadahnya, dan adanya terorisme bahkan tidak percaya dengan keberadaan tuhan atau *atheis* (Anggun Gading Pinilih et al., n.d.). Kelompok mayoritas dan manoritas masih menjadi pemicu terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial terjadi karena kurangnya toleransi antar umat beragama dan kurangnya sikap saling menghargai antar umat beragama. Dengan ini, kesenjangan sosial dapat diatasi dengan meningkatkan rasa toleransi, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama.
2. Sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dapat diartikan sebagai warga negara Indonesia harus mengakui kesamaan derajat antar manusia, kesamaan hak yang didapat dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai emas yang bermakna manusia adalah makhluk sosial dimana manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Sebagai manusia harus saling membantu karena manusia mustahil untuk hidup sendiri. Tetapi masih ada penyimpangan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat seperti tidak memperlakukan manusia selayaknya manusia. Penyimpangan yang terjadi seperti penganiayaan, tindak kekerasan, kejahatan seksual, dan pembunuhan. Apalagi di era modernisasi ini dengan kemajuan teknologi yang canggih ada tindak pelecehan seksual secara *online*, tindakan *bullying* lewat media sosial tanpa memperdulikan kondisi korban. Untuk mengatasi penyimpangan pada sila kedua Pancasila ini dengan menekankan perlakuan yang adil kepada semua orang tanpa melihat status sosial. Selain itu dibutuhkan pembekalan pendidikan kepada semua masyarakat tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan menegakkan hukum yang berlaku (Yani et al., n.d.).
3. Sila ketiga Pancasila berbunyi “Persatuan Indonesia” memiliki arti untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia dengan rasa rela berkorban dan cinta tanah air karena bangga menjadi bangsa Indonesia. Sila ketiga Pancasila memiliki simbol pohon beringin yang memiliki akar kuat, batang yang kuat, serta daun yang rimbun sehingga bisa digunakan untuk berteduh. Persatuan Indonesia ini memiliki nilai-nilai bahwa negara merupakan suatu tempat berkumpulnya manusia yang dimana terdapat banyak keberagaman mulai dari agama, suku, ras, dan budaya (Erviana et al., n.d.). Namun ada penyimpangan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan ini seperti masih banyak masyarakat yang mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan kelompok atau golongan. Hal ini yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial, solusi untuk mengatasi masalah ini dengan cara tidak bersikap egois dan mulai memikirkan kepentingan kelompok diatas kepentingan pribadi. Dengan ini,

kesenjangan sosial tidak akan terjadi Ketika seluruh masyarakat Indonesia bisa mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan diatas kepentingan individu.

4. Sila keempat Pancasila berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmad Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” yang memiliki arti bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk kebebasan berpendapat tanpa ada paksaan dari segi apapun. Sila keempat Pancasila ini dilambangkan dengan kepala banteng yang memiliki makna memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga tidak mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan golongan atau kelompok. Namun ada penyimpangan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Selain di kehidupan bermasyarakat juga terjadi di dunia politik. Sebagai contoh bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia politik yaitu adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan masih ada yang melakukan pemaksaan kehendak serta tidak ada kesepakatan saat bermusyawarah atau memutuskan pendapat pribadi tanpa memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. Hal ini yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial di Indonesia. Solusi untuk menangani penyimpangan ini dengan cara mendengarkan pendapat orang lain, memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat, melakukan musyawarah dan mengambil kesepakatan Bersama, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan ini, tidak akan terjadi kesenjangan sosial di kehidupan.

5. Sila kelima Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang memiliki arti bersikap adil kepada siapapun, menghargai hak-hak orang lain, tidak membedakan yang berakibat adanya kesenjangan sosial. Sila kelima Pancasila ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas yang bermakna sandang dan pangan. Sandang dan pangan memiliki arti bahwa manusia membutuhkan bahan pokok sandang seperti pakaian dan pangan seperti beras yang akan diolah menjadi nasi (Wijaya SDN Bandang Laok & Bangkalan, n.d.). Namun masih ada penyimpangan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh bentuk penyimpangan yang terjadi seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial dan perbedaan status sosial, dan kesenjangan pendidikan. Aktualisasi nilai—nilai Pancasila untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat yaitu dengan cara memberikan pendidikan yang merata ke seluruh wilayah Indonesia, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan membuat program jaminan kesehatan seperti Asuransi Kesehatan dan BPJS (Rohaeni & Saryono, 2018). Sehingga dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu kesenjangan sosial tidak akan terjadi selama tidak ada permasalahan yang dapat memicu terjadinya penyimpangan.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila merujuk pada upaya seseorang untuk mewujudkan prinsip yang terkandung dalam nilai dasar Pancasila. Seperti meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila, membangun kebijakan pemerintah seperti kesejahteraan sosial, kebijakan kesehatan, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia (Triwahyuningsih, 2018). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada sila keempat dengan cara mendorong masyarakat untuk melakukan aksi yang demokratis, diskusi publik untuk mengambil suatu kebijakan, serta pengambilan keputusan secara bermusyawarah. Serta memastikan pendistribusian secara merata kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi.

Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Berkontribusi untuk Membangun Harmoni Sosial

Indonesia terletak di wilayah yang strategis sehingga memiliki keberagaman dari agama, suku, ras, bahasa, dan budaya. Didalamnya terdapat dasar negara Indonesia yang dimana sumber dari segala hukum yaitu Pancasila. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan harmoni sosial di Indonesia. Tentunya pada era modernisasi ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berperan untuk memberikan landasan moral dan ideologis kepada seluruh masyarakat (Ratri & Najicha, n.d.). Dengan ini tidak akan terjadi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat dan terciptanya harmoni sosial. Harmoni sosial merujuk pada kondisi dimana seluruh warga negara Indonesia dapat hidup bersama dengan keberagaman yang ada. Ketika berbagai kelompok masyarakat dapat hidup bersama dengan damai dan saling mendukung dalam sebuah negara atau masyarakat, terciptalah harmoni sosial yang melibatkan kerukunan, toleransi, dan keseimbangan antar masyarakat termasuk kelompok etnis, agama, budaya, dan sosial. Keharmonian sosial menciptakan lingkungan yang membuat orang saling membantu, bekerja sama, dan berkembang dengan baik (Simbol et al., n.d.). Nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berkontribusi untuk membangun harmoni sosial karena:

1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa ini memberikan dasar moral yang kuat untuk para generasi muda di era modernisasi dengan saling menghormati dan menghargai antar umat beragama (Sari et al., 2022). Pada nilai ketuhanan ini seluruh rakyat Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan menghargai keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada sila pertama ini mendorong seluruh rakyat untuk bersatu dan hidup bersama dengan berbagai keberagaman sehingga mewujudkan harmoni sosial.
2. Pancasila menolak segala bentuk yang mengacu pada diskriminasi, termasuk diskriminasi suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Setiap hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, atau antargolongan sosial disebut sebagai "SARA". "SARA" digunakan untuk menggambarkan komponen yang seringkali dapat menyebabkan konflik, diskriminasi, atau ketidaksetaraan di dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor "SARA" seringkali merupakan masalah besar dalam masyarakat, dan dapat memengaruhi hubungan antar individu dan kelompok. Oleh karena itu, banyak upaya dilakukan di seluruh dunia untuk mengatasi diskriminasi dan konflik yang berkaitan dengan "SARA" serta mendorong kerukunan, toleransi, dan kesetaraan di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Komponen penting dari prinsip-prinsip Pancasila di Indonesia, yang mendukung persatuan dan kerukunan di antara keragaman agama, ras, etnis, dan golongan sosial sehingga terciptanya harmoni sosial dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada.
3. "Persatuan Indonesia" adalah sila ketiga Pancasila dan berkaitan dengan upaya mewujudkan harmoni sosial di Indonesia. Sila ini menekankan bahwa persatuan dan kesatuan sangat penting dalam keragaman masyarakat Indonesia. Sila ketiga menginspirasi rakyat Indonesia untuk bekerja sama untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Ini berarti bekerja sama untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari identitas nasional Indonesia adalah persatuan, seperti yang dinyatakan dalam sila ketiga. Ini menumbuhkan rasa kebanggaan negara yang kuat dan mendorong masyarakat untuk bersatu. Di Indonesia, Pentahelix adalah gagasan yang digunakan untuk menciptakan harmoni sosial yang terdiri dari lima komponen penting yaitu pemerintah, masyarakat, bisnis, akademisi, dan media (Elizamiharti & Doly Andhika Putra, 2022).
4. Prinsip "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan" yang dipegang teguh oleh Pancasila berperan untuk mendorong partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui proses demokratis ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan suatu kebijakan Menurut

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme di dunia politik. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk bersikap egois terhadap pendapatnya, semua harus di atas kesepakatan dan musyawarah bersama. Hal ini dapat mewujudkan harmoni sosial di lingkungan masyarakat maupun di dunia politik.

5. "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" merupakan sila kelima dari Pancasila. Sila ini menunjukkan bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan yang menciptakan kesetaraan dan keadilan sehingga semua orang dapat menikmati kemajuan. Stabilitas sosial dan kesejahteraan bersama sangat bergantung pada keadilan sosial. Pembangunan yang mengutamakan keadilan sosial didorong oleh Sila Kelima. Dengan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi, yang dapat mengurangi kemungkinan konflik sosial. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, adalah bagian penting dari menciptakan harmoni sosial. Menjamin hak-hak ini untuk semua warga negara adalah langkah penting dalam menciptakan harmoni sosial. Dengan menerapkan Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan. Karena ketidaksetaraan ekonomi dan sosial seringkali menjadi sumber konflik dan ketegangan di masyarakat, ini merupakan dasar penting untuk menjaga harmoni sosial (Sari et al., 2022).

Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang mendukung harmoni sosial. Ini berarti menjaga toleransi, keadilan, dan persatuan dalam masyarakat, serta mencegah konflik dan ketegangan yang terkait dengan suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai bukan hanya dasar negara, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, adil, dan beradab.

Kesimpulan dan Saran

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk mewujudkan harmoni sosial di Indonesia di era modern. Pancasila bukan hanya ideologi dasar negara tetapi juga pilar penting dalam menciptakan dan mempertahankan harmoni sosial. Nilai-nilai Pancasila mendorong toleransi, kerukunan, dan penghargaan terhadap keberagaman yang semakin kompleks di masyarakat modern. Ini menghasilkan masyarakat yang lebih damai dan saling mendukung. Pancasila mendorong penghormatan terhadap budaya dan identitas lokal di era modernisasi yang sering kali dipengaruhi oleh dunia luar. Ini memungkinkan masyarakat mempertahankan akar budaya mereka sambil tetap tahan terhadap perubahan kontemporer. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip Pancasila dan mewujudkan harmoni sosial adalah tanggung jawab pemerintah. Pancasila mendorong penghormatan terhadap budaya dan identitas lokal di era modernisasi yang sering kali dipengaruhi oleh dunia luar. Ini memungkinkan masyarakat mempertahankan akar budaya mereka sambil tetap tahan terhadap perubahan kontemporer. Sangat penting untuk terus memahami, menginternalisasi, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai harmoni sosial di era modernisasi. Ini akan membantu menjaga persatuan, toleransi, keadilan, dan partisipasi masyarakat yang aktif, semua komponen yang sangat penting untuk mencapai harmoni sosial dalam masyarakat yang sedang berubah.

Dalam era globalisasi saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila masih memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pendidikan yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila harus didorong mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini dapat membantu generasi muda memahami, menghargai, dan menginternalisasi prinsip Pancasila. Aktif mendorong toleransi dan penghargaan terhadap berbagai agama, suku, dan budaya. Program dialog antaragama dan antarsuku serta kerja sama lintas agama dapat membantu memperkuat hubungan antarwarga yang beragam. Dalam era globalisasi saat ini, interaksi masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh teknologi informasi. Sangat penting bagi masyarakat untuk dididik tentang cara menggunakan dunia maya secara etis dan bertanggung jawab serta cara menghindari penyebaran konten yang dapat menyebabkan konflik atau ketegangan. Meningkatkan kesadaran tentang masalah global, termasuk masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, melalui pendidikan dan komunikasi. Masyarakat Indonesia dapat merasa lebih terhubung dengan tantangan di seluruh dunia dan dapat mencari solusi bersama dengan kesadaran ini. Mendorong media massa untuk memainkan peran yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila memiliki potensi untuk membentuk opini publik dan memengaruhi pemahaman masyarakat tentang masalah sosial. Dalam dunia modern saat ini, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila adalah kunci untuk mempertahankan keharmonisan masyarakat, menghadapi tantangan modernisasi, dan memperkuat identitas nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggun Gading Pinilih, S., Nurul Hikmah, S., Soedarto, J., & Semarang, T. (n.d.). *AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DI INDONESIA*.
- Della, T., Dian, B., Multikultura, E., Edukasia, J. ", Sintia, T. Della, & Wahyuni, B. D. (2022). *MULTIKULTURA* (Vol. 4, Issue 1).
- Elizamiharti, & Doly Andhika Putra. (2022). The Principles of Pentahelix in supporting the awareness of State Defense in the Millennial generation in the Globalization Era. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(7), 1345–1356. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i7.1818>
- Erviana, N., Kustoyo, H., & Zunariyah, S. (n.d.). *PEMAKNAAN MAHASISWA TERHADAP SIMBOL PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA*. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). POLITIK HUKUM LEGISLASI SEBAGAI SOCIO-EQUILIBRIUM DI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- Islahiha, N. A., Frita, N., & Maulana, R. (n.d.). *PENERAPAN SISTEM PEREKONOMIAN SYARIAH DALAM MENGATASI KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI INDONESIA*. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm-p/issue/archive>
- Ismail, M. (n.d.). *Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI-UMI Makassar | 193 Hedonisme dan Pola Hidup Islam*.
- Masyhuri, A. A. (2019). MASA DEPAN JALAN HARMONI SOSIAL KEBERAGAMAAN DALAM MENJAGA INDONESIA. In *Universitas Pamulang*.
- Ratri, E. P., & Najicha, F. U. (n.d.). *URGENSI PANCASILA DALAM MENANAMKAN JIWA NASIONALISME PADA GENERASI MUDA DI ERA GLOBALISASI*. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/>

- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). *Number 1 Indonesian Journal of Education Management and Administration Review* (Vol. 2).
- Sari, R., Ulfatun Najicha, F., & Artikel, I. (2022). *MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT*.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>
- Simbol, P., Sosial, H., & Ernas, S. (n.d.). *POLITIK SIMBOL DAN HARMONI SOSIAL: Makna Satu Tungku Tiga Batu dalam Dinamika Politik Lokal di Fakfak Papua Barat*.
- Suwartiningsih, S., Samiyono, D., & Purnomo, D. (2018). Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1).
<https://doi.org/10.18196/hi.71120>
- Triwahyuningsih, S. (2018). *LEGAL STANDING PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA* (Vol. 2, Issue 2).
- Wijaya SDN Bandang Laok, A., & Bangkalan, K. (n.d.). *PENINGKATAN HASIL BELAJAR PKN PADA MATERI POKOK MAKNA DAN KETERKAITAN SIMBOL-SIMBOL SILA PANCASILA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING SISWA KELAS VI SDN BANDANG LAOK 2 KOKOP KABUPATEN BANGKALAN*.
- Yani, D., Anggraeni Dewi, D., & Guru Sekolah Dasar, P. (n.d.). *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Tantangan di Arus Globalisasi*.